

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Syahirah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Korespondensi penulis: syahirahmatondang27@gmail.com

Muhammad Yafiz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: muhammadyafiz@yahoo.co.id

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Abstract. *This study aims to determine the measurement of the financial performance of the Regional Government of Medan City using value for money at the Regional Financial and Asset Management Agency of Medan City. This research uses a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques in this study are in the form of interview techniques and documentation techniques. Based on the results of the study obtained namely, The Financial Performance of the Medan City Government as measured by the economic ratio from 2017-2021 can be said to be economical because based on the economic ratio calculated for 5 years, the overall average is 77%, which is included in the economic category because the economic ratio level is less than 100%. In terms of efficiency, from 2017-2021, the overall average is 95%, which is included in the efficient category because the efficiency ratio level is less than 100%. And in terms of effectiveness from 2017 – 2021, the overall average is 85%, which is included in the ineffective category because the effective ratio level is still below 100%.*

Keywords: *Financial Performance Measurement, Local Government, Value For Money.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan menggunakan *value for money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh yaitu, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan rasio ekonomis dari tahun 2017–2021 sudah dapat dikatakan ekonomis karena berdasarkan rasio ekonomis yang dihitung selama 5 tahun rata-rata keseluruhan sebesar 77% yang dimana termasuk dalam kategori ekonomis karena tingkat rasio ekonomis kurang dari 100%. Dari segi efisien dari tahun 2017–2021 rata-rata keseluruhan sebesar 95% yang dimana termasuk dalam kategori efisien karena tingkat rasio efisien kurang dari 100%. Dan dari segi efektif dari tahun 2017 – 2021 rata-rata keseluruhan sebesar 85% dimana termasuk dalam kategori tidak efektif karena tingkat rasio efektif masih berada dibawah 100%.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, *Value For Money*.

LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan daerah adalah tingkatan yang bisa digunakan dalam melihat kesanggupan daerah didalam melaksanakan pemerintahan daerah. wujud dari pengukuran kinerja ialah rasio keuangan berupa dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang diperoleh dari perhitungan APBD. Pengukuran kinerja keuangan begitu penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah didalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kemana uang publik dibelanjakan, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam melihat bahwa uang publik apakah telah dibelanjakan sesuai tingkatan rasio efisien, efektif, dan ekonomi (Handayani & Budiyanto, 2021).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dinilai dengan konsep *Value For Money*. *Value For Money* adalah gambaran pengelolaan organisasi sektor publik yang berlandasan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisien, dan efektif (Polii et al., 2020:781). Ekonomi wajib bisa terbatas sumber masukan dengan menghindari pengeluaran yang boros serta tidak hemat. Efisien adalah perolehan *output* dengan *input* yang tertentu, bisa dilihat dari rendahnya tingkat rasio yang diperoleh tandanya kinerja organisasi sektor publik bekerja dengan baik dan benar. Efektif adalah perbandingan dalam *outcome* dan *output* supaya perolehan hasil dengan capaian yang sudah ditetapkan (Perdana et al., 2020:339).

Value for money merupakan konteks ekonomi daerah yang dimana sebagai tempat untuk bisa membawa pemerintah kepada daerah yang memperoleh sistem pemerintahan yang benar. Pengelolaan dana publik biasanya dengan menerapkan *value for money* maka itu harus mempunyai sistem pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintahan yang benar. Dengan memakai pengukuran *value for money* maka indikator digunakan harus diperoleh dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah, dan anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Laporan yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu dimana laporan berisikan mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan biaya dari suatu entitas yang akan dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Terdapat adanya laporan tersebut agar melihat bagaimana informasi mengenai kondisi ekonomi yang diterima dalam membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dan juga akibat atas terhadap kondisi ekonomi tersebut. Jika terdapat

masalah suatu Laporan Realisasi Anggaran tidak bisa dipublikasikan, maka Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan informasi yang begitu bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan pada pengguna laporan keuangan atau anggaran apakah masuk kedalam efektif dan efisien dalam melakukan realisasi suatu anggaran selama satu tahun (Fitriyani & Febrianti, 2020).

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi urusan penunjang Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah Sebagai Entitas pelaporan yang menyelenggarakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai Entitas Akuntansi melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyusun laporan keuangan SKPD dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Dalam perokonomian Kota medan meliputi berbagai sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi, industri pengelolaan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penggunaan pendapatan terbesar Kota Medan didapat dari pajak daerah dan distribusi daerah. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah tergolong dalam kriteria, efisiensi, dan efektif hal tersebut dapat meningkatkan PAD.

Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan bahwa penerimaan PAD Kota Medan belum maksimal dikarenakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 berjalan tanpa ada terobosan-terobosan. Upaya perbaikan manajemen pengelolaan serta optimalisasi pengawasan di lapangan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi sampah belum terlaksana sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dilakukan Laila Intan (2018) dengan judul “Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan, rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan jika diukur dengan menggunakan metode Value For Money ditinjau dari rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

KAJIAN TEORITIS

1. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut (Hutabarat, 2020) kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan instansi dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang baik dan benar. Kinerja keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran. Penerapan kinerja keuangan yang bernilai transparan dan akuntabilitas diharapkan mampu mengurangi kebocoran dana, pemborosan, dan menemukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan secara ekonomis (Ardila dan Putri, 2015).

Adapun kinerja pemerintah daerah adalah prestasi kerja atau pelaksanaan, pada prinsipnya kinerja disimpulkan sebagai kontribusi yang diberikan oleh suatu unit bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Menurut Mahsun (2012:25) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi (Pundissing & Pagi, 2021:13). Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2. Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja merupakan penilaian kinerja secara tidak langsung dengan sifat yang berfokus pada bidang yang dinilai butuh perbaikan kinerja. Pengukuran kinerja ini berdasarkan organisasi pemerintahan adalah implementasi atas konsep *Value For Money*, yang dimana *value for money* memiliki tiga komponen yaitu : ekonomi, efisiensi, efektif. Untuk dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, organisasi pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. Dimana Ulum menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator Masukan (*input*) adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.
- 2) Indikator Keluaran (*output*) adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.
- 3) Indikator Pencapaian Hasil (*outcome*) adalah hasil yang dicapai dari program ataupun kegiatan dengan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran *outcome* merupakan mengukur nilai kualitas dari hasil *output*.

Peran indikator kinerja bagi pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- 2) Untuk mengevaluasi target yang dihasilkan.
- 3) Sebagai masukan untuk menentukan skema manajerial.
- 4) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan penelitian.
- 5) Untuk menunjukkan standar kinerja.
- 6) Untuk menunjukkan efektivitas.
- 7) Untuk membantukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- 8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atas proses yang masih potensial untuk dilakukan suatu biaya (Handayani & Budiyanto, 202:7).

3. Kinerja Dalam Prespektif Islam

Didalam Islam dimaksud dengan kinerja supaya manusia bisa lebih baik untuk melakukan pekerjaannya karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Adapun didalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 105 tentang kinerja yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Tema “kerja” pada ayat di atas diungkapkan lewat kata ‘amal. Para musafir memahami kata ‘amal pada ayat tersebut mengacu pada arti amal- amal saleh. Bahkan ada kesan, kata amal dipahami sebagai ibadah. Pemahaman kata amal (kerja) sebagai ibadah juga haruslah menjadi pedoman bagi umat Islam untuk kehidupannya. Konteks kerja yang merupakan ibadah ialah dengan membawa atau mengingat Allah didalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Supaya keuntungan yang dihasilkannya menjadi suatu keberkahan.

4. Value For Money

Menurut Kementerian Keuangan *Value For Money* merupakan sebuah konsep dalam pengukurab kinerja. *Value For Money* yaitu indicator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi Masyarakat. Sektor publik diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis (hemat) dalam mengalokasikan sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam mencapai *output* yang maksimal dengan sumber daya yang minim, serta efektivitas (berhasil guna) dalam mencapai tujuan (Wuwungan, 2019).

Dalam upaya mengelola anggaran publik *value for money* menerapkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Ekonomi: sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input* sumber daya yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi: merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang terendah menunjukkan efisiensi, Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Republik Indonesia, n.d.).

5. Indikator Value For Money

Menurut (Halim dan Kusufi, 2013) dalam penerapan konsep *value for money* perlu diketahui mengenai beberapa bagian yang nantinya akan digunakan dan ditentukan dalam pengukuran, yaitu secara *input* yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang. Pengukuran *input* dilakukan dengan membandingkan *input* berupa kas dan *input* yang direalisasikan, kemudian *ouput* merupakan hasil langsung dari suatu proses yang dilaksanakan menggunakan *input*. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi kegiatan yang berbentuk barang atau jasa. Dan *outcome* merupakan dampak yang

dirasakan oleh masyarakat akibat dari suatu kegiatan. Pengukuran *outcome* digunakan untuk mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat beberapa indikator *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomis merupakan penggunaan *input* dengan kuantitas nilai uang yang layak dan tidak melakukan pemborosan dalam kegiatan.
- 2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang minim dalam menghasilkan *output* yang bernilai guna.
- 3) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, dan kegiatan yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap sasaran.

6. Manfaat Implementasi Value For Money

Manfaat implementasi *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkannya mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya publik karena hilangnya *inefisiensi* dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- 4) Alokasi belanja yang lebih fokus pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan dana publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas public (Republik Indonesia, n.d.).

7. Langkah – langkah Pengukuran Value For Money

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi adalah prosedur memperoleh *input* yang paling efisiensi dan efektif dengan harga serendah mungkin. Pengukuran ekonomi diartikan juga pengukuran yang *relatif* hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan (Biduri, 2018:70). Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran realisasinya. Pengukuran indikator ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomi yaitu klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomi.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Ekonomi

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|--------------------|
| Kurang dari <100% | Ekonomis |
| Lebih dari >100% | Tidak Ekonomis |
| Sama dengan =100% | Ekonomis Berimbang |

Sumber : Mardiasmo (2009)

b. Pengukuran Efisien

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau terendah untuk mencapai *output* tersebut. Perbandingan efisiensi ialah *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa yang menghasilkan sebuah aktivitas atau kegiatan. Bayangkara (2015), efisiensi adalah ukuran atau proses yang menghubungkan antara *input* dan *output* dalam perusahaan.

Berikut rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-------------------|
| Kurang dari <100% | Efisien |
| Lebih dari >100% | Tidak Efisien |
| Sama Dengan =100% | Efisien Berimbang |

Sumber : Mardiasmo (2009)

c. Pengukuran Efektif

Pada kamus ilmiah mendefinisikan bahwa efektivitas adalah ketetapan penggunaan, hasil guna ataupun penunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam setiap organisasi,

kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran tercapai seperti yang ditentukan. Dalam buku oleh “Manajemen Kinerja Sektor Publik” yang diusung oleh Mahmudi (2015) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi yang diberikan maka *output* untuk mencapai tujuan semakin efektif pada setiap organisasi, program atau kegiatan. Dari pengertian efektivitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai sehingga pelaksanaannya memberikan hasil yang bermanfaat dan benar (Cahyani,H.N.,&Hasibuan, 2016:56).

Demikianlah maka pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efektivitas dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efektivitas yaitu klasifikasi atas pengukuran rasio efektivitas.

Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Efektif

| Persentase | Kriteria |
|--------------------|-------------------|
| Lebih dari >100% | Efektif |
| Kurang dari < 100% | Tidak Efektif |
| Sama dengan =100% | Efektif Berimbang |

Sumber : Mardiasmo (2009)

8. Value For Money Dalam Prespektif Islam

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Adapun menurut Majid dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan (Arifiansyah et al., 2022:2). Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.(Q.S. An- Nahl : 90).

Ayat diatas tersebut Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Allah melarang untuk berbuat kemungkaran, dan permusuhan. Maka didalam Islam sendiri menekankan dalam mengelola anggaran haruslah dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinabungan, meningkatkan kemaslahatan umat tetapi tidak boleh berlebihan. Untuk dapat melakukan keseimbangan secara adil akan perlu adanya penanam sikap jujur di diri seseorang agar bisa mencapai segala kesejahteraan publik yang seimbang dan tidak memihak pada siapapun ataupun menganiaya orang lain.(Harahap Isnaini, Nasution Juliati Samri Yenni, Marliyah, 2018:167).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang merumuskan dengan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan kesimpulan, data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan dipahami sehingga mendapatkan kesimpulan yang valid (Fauzi et al., 2020:21). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk dapat mengetahui nilai variabel mandiri tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya (Abubakar, 2020:6). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Kota Medan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak yang kompeten dalam bidang sektor keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pendukung seperti struktur organisasi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan pemerintah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Ditinjau Dari Rasio Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Bidang Anggaran (2023) pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, maka untuk rasio ekonomi Pemerintah Kota Medan yang diukur 5 tahun, yaitu:

Tabel 4. Rasio Ekonomi Pemerintah Kota Medan

| Tahun | Anggaran Belanja Daerah | Realisasi Belanja Daerah | Rasio Ekonomi |
|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 2017 | 5.546.733.964.019 | 4.394.045.824.264 | 79,21% |
| 2018 | 5.449.562.922.528 | 4.213.480.509.762 | 77,31% |
| 2019 | 6.302.963.592.428 | 5.059.387.661.308 | 80,26% |
| 2020 | 5.254.667.074.339 | 3.854.742.410.736 | 73,35% |
| 2021 | 5.731.395.062.275 | 4.499.145.144.311 | 78,50% |

Rasio ekonomi Pemerintah Kota Medan Tahun 2017-2021 diatas menunjukkan bahwa rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan tahun 2017 sebesar 79,21%, tingkat ekonomis pada tahun 2018 sebesar 77,31%, tingkat ekonomis pada tahun 2019 sebesar 80,26%, tingkat ekonomis pada tahun 2020 sebesar 73,35%, dan pada tahun 2021 tingkat ekonomis sebesar 78,50%. Rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan 2017-2021 untuk keseluruhan diperoleh rasio ekonomis sebesar 77%. Yang dimana termasuk dalam kategori ekonomis.

Melalui pengukuran ekonomi dapat diketahui anggaran yang dihemat dalam memperoleh input. Jika selama lima tahun dari 2017-2021 tingkat ekonomi yang telah dicapai kurang dari 100% maka Pemerintah Kota Medan baik karena telah sesuai dengan konsep ekonomis yakni melakukan penghematan dalam mengelola anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Jika sumber daya yang digunakan lebih rendah daripada anggaran dikatakan telah terjadi penghematan segi ekonomis.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program harus memilih sumber daya dengan kualitas yang baik dan menggunakan harga yang terendah, berdasarkan wawancara kepada Bidang Anggaran Pemerintah Kota Medan melalui bagian-bagiannya selalu memilih terlebih dahulu produk yang terbaik dengan harga kompetitif dengan kualitas yang baik dan jika saat ini membeli barang atau jasa sudah beralih ke *digital* melalui *e-katalog* yang sudah ditentukan di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah) harga sudah sesuai dengan *e-katalog* yang ada dikota, jadi setiap daerah hanya bisa membeli barang sesuai spesifikasi yang sudah disediakan *e-katalog* LKPP.

2. Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Ditinjau Dari Rasio Efisien

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Bidang Anggaran (2023) pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, maka untuk rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur 5 tahun, yaitu:

Tabel 5. Rasio Efisien Pemerintah Kota Medan

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Rasio Efisien |
|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2017 | 4.394.045.824.264 | 4.409.065.482.200 | 99,65% |
| 2018 | 4.213.480.509.762 | 4.253.618.758.532 | 99,05% |
| 2019 | 5.059.387.661.308 | 5.518.772.179.306 | 91,67% |
| 2020 | 3.854.742.410.736 | 3.988.761.485.152 | 96,83% |
| 2021 | 4.499.145.144.311 | 5.023.080.346.608 | 89,56% |

Rasio efisien Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017-2021 diatas menunjukkan bahwa rasio efisien Pemerintah Kota Medan tahun 2017 sebesar 99,65, tingkat efisien pada tahun 2018 sebesar 99,05%, tingkat efisien pada tahun 2019 sebesar 91,67%, tingkat efisien pada tahun 2020 sebesar 96,83% dan pada tahun 2021 tingkat efisien sebesar 89,56%. Rasio efisien kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan 2017-2021 untuk rata-rata keseluruhan diperoleh rasio efisien sebesar 95%. Yang dimana termasuk dalam kategori efisien.

Melalui pengukuran efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisien ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Belanja Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Untuk Belanja Daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah tahun 2017-2021 selalu berada dikategori efisien karena tingkat rasio efisien berada dibawah 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih terbilang kategori efisien karena rasio yang dicapai masih dibawah 100%. Berarti setiap belanja selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan. Hanya saja pada tahun 2017 yang tidak sesuai karena belum dapat menimalkan dana anggaran sehinggann realisasi anggaran belanja

sebesar 4.394.045.824.264 lebih tinggi nilainya daripada realisasi anggaran pendapatan yang digunakan 4.409.065.482.200, untuk tahun 2018-2021 dapat dikatakan sudah berhasil dalam mencapai kinerja yang efisien karena mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengifisiensikan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai, hasil analisis Pemerintah Kota Medan realisasi belanja sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Ditinjau Dari Rasio Efektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Bidang Anggaran (2023) pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, maka untuk rasio efektif Pemerintah Kota Medan yang diukur 5 tahun, yaitu:

Tabel 6. Rasio Efektif Pemerintah Kota Medan

| Tahun | Pendapatan | | Rasio Efektif |
|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| 2017 | 5.523.623.117.419 | 4.409.065.482.200 | 79,82% |
| 2018 | 5.239.408.011.116 | 4.253.618.758.532 | 80,23% |
| 2019 | 6.257.239.035.331 | 5.518.772.179.306 | 88,19% |
| 2020 | 4.757.852.448.866 | 3.988.761.485.152 | 83,83% |
| 2021 | 5.208.964.175.119 | 5.023.080.346.608 | 96,43% |

Rasio efektif Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017-2021 diatas menunjukkan bahwa rasio efektif Pemerintah Kota Medan tahun 2017 sebesar 79,82%, tingkat efektif pada tahun 2018 sebesar 80,23%, tingkat efektif pada tahun 2019 sebesar 88,19%, tingkat efektif pada tahun 2020 sebesar 83,83%, dan tingkat efektif pada tahun 2021 sebesar 96,43%. Rasio efektif kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan 2017-2021 untuk keseluruhan rata-rata diperoleh rasio efektif sebesar 85%. Yang dimana termasuk dalam kategori tidak efektif.

Melalui pengukuran efektivitas tersebut dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan supaya mendorong kinerja Pemerintah dalam rangka mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Jadi Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum berhasil dalam mencapai kinerja yang efektif.

Berdasarkan wawancara kepada Bidang Anggaran Penyebab terjadinya Pemerintah Kota Medan untuk Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan terjadi karena penganggaran atau target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan belum dikelola secara baik sehingga untuk pelayanan terhadap Masyarakat belum terpenuhi. Dengan begitu *output* yang dihasilkan tidak dapat memenuhi target dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan Pemerintah Kota Medan. Tetapi realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan dan Pemerintah Kota Medan juga berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah dengan baik melalui pajak maupun retribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan rasio ekonomi dari tahun 2017 – 2021 untuk keseluruhan rata-rata diperoleh rasio ekonomis sebesar 77% termasuk dalam kategori ekonomis karena tingkat rasio ekonomis kurang dari 100%. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan rasio efisien dari tahun 2017 – 2021 untuk keseluruhan rata-rata diperoleh rasio efisien sebesar 95% termasuk dalam kategori efisien karena tingkat rasio efisien kurang dari 100%. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan rasio efektif dari tahun 2017 – 2021 untuk keseluruhan rata-rata diperoleh rasio efektif sebesar 85% termasuk dalam kategori tidak efektif karena tingkat rasio efektif masih kurang dari 100%.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil kesimpulan diatas dapat mengemukakan saran bahwa: Dilihat dari tingkat rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kota Medan selama periode 2017-2021 diharapkan sebaiknya lebih meningkatkan lagi dalam melakukan penghematan dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Dilihat dari tingkat rasio efisien Pemerintah Kota Medan selama periode 2017-2021 diharapkan sebaiknya menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi pendapatan daerah tetap efisien. Dilihat dari tingkat

rasio efektif Pemerintah Kota Medan selama periode 2017-2021 diharapkan sebaiknya untuk dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Medan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, supaya proses pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah berjalan dengan baik dan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, R. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (Vol. 21, Issue 1).
- Cahyani, H. N., & Hasibuan, N. F. A. (2016). *Efektivitas dan Efisiensi Aplikasi Pembayaran Tagihan Terhadap Pendapatan Bulanan Indihome Pada PT. Telekomunikasi Tbk Witel Medan*. 2(1), 1–23.
- Fauzi, A., Nisa B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartingsih, M. S. . (2020). *Metodologi Penelitian In Paper Knowledge . Toward a Median History of Documents*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Gusti Ayu Widiyanti, I., Fitriyah, N., & Bayu S, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pendekatan Value for Money Pemerintah Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Mataram. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 1–13.
- Handayani, N., & Budiyanto, A. (2021). Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol 11 No 3, 16.
- Harmain, H., Naser Daulay, A., Tamara Enre, D., & Medan Sumatra Utara Medan, U. (2020). Analysis Of Value For Money. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/>
- Hasibuan, N. F. A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan dengan Profit Sensitivity Analysis Pada Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, Vol 1, No(2), 215–219.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1. <https://doi.org/>
- Kariyoto, K. (2018). Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/>
- Larasati, R. S. S., & Nurhayati. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value For Money. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/>
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788..
- Republik Indonesia. (n.d.). *Value For Money*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/>
- Silalahi Dison Alistraja., Jubi., Kamilah., Nainggolan Dewi Christine., Lufriansyah., Sembiring Masta., D. S. P. (2019). *Akuntansi Manajemen*. MADENATERA.

Siregar, C. M., & Harahap, L. H. (2022). Analisis APBD untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan tahun 2015-2021. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 3(2), 659–669. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka%0AAalisis>